



# GAPKI

## NEWS

RAKERNAS GAPKI 2024

## INDUSTRI SAWIT MENUJU INDONESIA EMAS 2045



## Panduan Kerja Organisasi

### **Pembaca yang budiman,**

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena penerbitan buletin *GAPKI News* edisi Juli 2024 dapat kita rampungkan sesuai rencana. Banyak kegiatan menarik yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota GAPKI dalam dua bulan terakhir. Dari penguatan komitmen industri sawit bebas pekerja anak sampai menjadikan industri sawit tempat yang layak untuk bekerja dan membangun karir.

Namun, dari beberapa kegiatan tersebut, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GAPKI tahun 2024 terasa istimewa. Forum tertinggi organisasi setelah musyawarah nasional ini merupakan Rakernas pertama sejak Pengurus GAPKI 2023-2028 disahkan. Di forum inilah program kerja GAPKI 2023-2024 yang dicanangkan sejak satu tahun lalu dievaluasi sebagai bahan masukan penting merancang program kerja 2024-2025.

Rakernas GAPKI tahun 2024 telah menetapkan beberapa hal penting sebagai pijakan untuk melangkah ke depan. Beberapa keputusan mendasar terkait langsung dengan organisasi dan sisanya rencana besar di masa depan. Salah satunya bagaimana menyiapkan industri sawit menuju Indonesia Emas 2045.

Selain Rakernas, IPOS Forum ke-9 di Medan juga menjadi catatan penting karena spektrum dan jangkauan kegiatan ini berskala nasional. Forum tahunan ini jadi salah satu barometer langkah para pemangku kepentingan sawit ke depan. Kegiatan yang tidak kalah pentingnya juga berlangsung di beberapa kantor GAPKI cabang.

Seiring dengan disahkannya program kerja 2024-2025, setiap anggota GAPKI diharapkan terus berkontribusi untuk negeri tercinta ini. Semoga penerbitan *GAPKI News* memberikan energi tambahan untuk kita semua. Selamat menikmati dan membaca. ■

Salam,  
Redaksi GAPKINews

## **GAPKINews**

Media Komunikasi  
dan Informasi Anggota  
GAPKI

**PENERBIT**  
GAPKI Pusat

**PEMBINA**  
Eddy Martono  
Sany Anthony  
Susanto Yang  
Satrija B. Wibawa  
M. Hadi Sugeng  
Mona Surya

**PENGARAH**  
Mukti Sardjono

**TIM AHLI**  
Para Ketua Bidang  
Pengurus Pusat GAPKI

**PENANGGUNG JAWAB**  
Fenny Sofyan

**Dewan Redaksi**  
Yudha Negara Nyoman  
Indah Permata Soegyarto  
Ratri Melanda Maharani  
Dyah Laras Wulandari  
Susan Sri Rahayu  
Eko Tamba

**ALAMAT**  
Kantor GAPKI Pusat  
Sudirman Park Blok B-18  
Jalan KH Mas Mansur Kav. 35  
Jakarta 10220

(+62) 21-5794-3871  
gapki@gapki.id | gapkipusat@  
yahoo.com

|                                                                                    |                                                 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
|  | Memperkuat Komitmen Menentang Pekerja Anak..... | 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Salam Redaksi.....                                                  | 2   |
| Daftar Isi.....                                                     | 3   |
| Rakernas GAPKI 2024: Industri Sawit Menuju Indonesia Emas 2045..... | 4,5 |
| Satukan Langkah Wujudkan Program Kerja 2024-2025.....               | 6   |
| IPOS Forum 2024 Hasilkan 10 Rekomendasi.....                        | 7   |
| Akselerasi Pengembangan Sistem Nasional Dashboard Komoditas.....    | 8   |
| Sosialisasi Bursa CPO dan Bursa Karbon Dalam Kebijakan Sawit.....   | 9   |
| Perkuat Relasi Media, GAPKI Kunjungi Narasi TV.....                 | 10  |
| Sawit Indonesia Ramah Anak dalam Rekaman Kamera.....                | 11  |
| Industri Sawit Berkomitmen Sediakan Tempat Kerja Layak.....         | 13  |
| Lomba Karya Jurnalistik Sawit 2024.....                             | 14  |
| Pola Kemitraan Tingkatkan Kesejahteraan Petani.....                 | 15  |



GAPKI Perkuat Misi Dagang  
Indonesia ke Chile..... 16



Sosialisasi Sertifikasi Halal  
Produk CPO..... 17



Pilkada Serentak Diharapkan  
Berdampak Positif pada Dunia  
Usaha..... 18

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Merumuskan Strategi Diplomasi Ekonomi Sawit.....                        | 19 |
| Audiensi Rencana Penerapan Kebijakan Land Application.....              | 20 |
| GAPKI Sampaikan Usulan dalam Rapat Evaluasi DMO.....                    | 21 |
| Pemerintah Diminta Mengajukan Penundaan EUDR.....                       | 22 |
| Indonesia-Jerman Dorong Penyelesaian Perundingan IEU-CEPA.....          | 23 |
| Puluhan Anggota GAPKI Salurkan Bantuan Korban Banjir di Luwu Utara..... | 24 |
| Menuju Papua Emas 2045 Bersama Sawit.....                               | 25 |
| Perkuat Pencegahan Karhutla, GAPKI Sumsel Selenggarakan TOT.....        | 26 |
| GAPKI Dorong Peningkatan Produktivitas dan Produksi CPO.....            | 27 |
| Mendorong Dialog Sosial yang Kuat di Sektor Sawit.....                  | 28 |
| Tiga Kunci Percepatan Hilirisasi Industri Sawit.....                    | 29 |
| Mengenalkan Sawit dengan Sentuhan Kearifan Lokal Papua.....             | 30 |
| Borneo Forum ke-7 Dorong Penguatan Kepastian Hukum.....                 | 31 |
| Bersama GAPKI, Satgas Sawit Sosialisasikan HGU dan FPKMS.....           | 32 |
| GAPKI Sumbang Bantu Korban Banjir Lahar Dingin Marapi.....              | 33 |
| GAPKI Bahas Beragam Topik tentang Sawit di AI Jazzera.....              | 34 |
| Wiwin Kurniawan Terpilih Sebagai Ketua GAPKI Cabang Bengkulu.....       | 35 |



RAKERNAS GAPKI 2024

# INDUSTRI SAWIT MENUJU INDONESIA EMAS 2045

*Program GAPKI diharapkan menjadi pondasi mewujudkan Industri Sawit Menuju Indonesia Emas 2045.*

**T**epat setahun setelah Pengurus GAPKI 2023-2028 terbentuk, evaluasi program kerja 2023 dilakukan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPKI. Rakernas 2024 yang diadakan di Grand Mercure Bandung pada 21 Mei 2024 itu mengangkat tema *Peningkatan Produksi Melalui PSR dan Penelitian untuk Ketahanan Pangan dan Energi Nasional Secara Berkelanjutan*. Rakernas diikuti oleh 112 orang dari pengurus GAPKI pusat, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Pengawas, dan perwakilan GAPKI cabang di seluruh Indonesia.

Selain evaluasi program kerja 2023, Rakernas juga menetapkan program kerja 2024-2025, penetapan iuran anggota tahun 2025, penetapan keputusan lain, dan *team building* untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan kekompakan para pengurus GAPKI. Rakernas adalah forum strategis dan forum tertinggi setelah Munas. Karena itu, isu-isu penting dan krusial menjadi topik pembahasan dan penyelarasan program kerja.

Dalam sambutan Rakernas, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan tema Rakernas relevan

## GAPKI juga menyuarkan pentingnya penyelesaian PKS Tanpa Kebun dan PKS Brondolan.

dengan kondisi sawit sekarang di mana terjadi stagnansi pertumbuhan produksi saat kebutuhan untuk pangan, industri dan energi dalam negeri meningkat. PSR adalah langkah strategis sehingga anggota GAPKI perlu berpartisipasi aktif. Begitu juga dengan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas tanaman harus terus dilakukan.

Tantangan industri sawit semakin besar karena penyelesaian kebun sawit yang dimasukkan dalam kawasan hutan belum tuntas. Selain itu, tuntutan masyarakat terhadap FPKM 20% yang marak tidak jarang berkembang menjadi aksi anarkis. Kondisi ini terjadi akibat multi tafsir terhadap Permentan No. 26 tahun 2007. Untuk mencegah dampak lebih luas, GAPKI dan Polri menjalin kerjasama yang perlu ditindaklanjuti

oleh GAPKI cabang bersama Polda.

Dalam Rakernas 2024, GAPKI juga menyuarkan pentingnya penyelesaian PKS Tanpa Kebun dan PKS Brondolan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS). GAPKI mendorong supaya perizinan PKS Tanpa Kebun dan PKS Brondolan merujuk pada Permentan No. 98 tahun 2013.

Pemaparan kondisi terkini industri oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono diperkuat oleh Ketua Dewan Pembina GAPKI Joe fly J. Bahroeny. "Masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri harus segera diselesaikan," katanya. Sebab, penyelesaian yang berlarut-larut justru merugikan semua pihak, tidak hanya petani dan pengusaha, tapi juga negara. Hal ini tidak lepas dari kontribusi besar sawit terhadap perekonomian nasional maupun kondisi global.

Perang Rusia dan Ukraina dan situasi terakhir Timur Tengah menimbulkan tekanan besar terhadap perekonomian global. Begitu juga dengan China, salah satu konsumen terbesar komoditas sawit yang mengalami pelambatan ekonomi.

## Kondisi industri sawit nasional memang sedang tidak baik-baik saja.

Situasi ini semakin menantang karena ekspor ke Uni Eropa penurunan. Ekspor ke Uni Eropa tahun 2022 mencapai 5,03 juta ton, lalu turun menjadi 4,17 ton pada 2023.

Tantangan industri sawit makin besar belakangan ini dengan maraknya kampanye negatif di beberapa negara. Dampak kampanye negatif sudah terasa pada kinerja sawit tahun 2024. "Kondisi industri sawit nasional memang sedang tidak baik-baik saja," katanya. Tapi, di balik setiap tantangan, pasti ada peluang. Inilah celah yang harus dimanfaatkan GAPKI untuk menyusun kembali program dan rencana kerja serta target yang diharapkan.

Dewan Pembina GAPKI meminta peserta Rakernas untuk mendalami kembali program kerja 2024-2025 sebagai dasar pelaksanaan kerja organisasi. Forum ini adalah kesempatan terbaik mendiskusikan apa yang harus dijalankan untuk menjawab dan mengantisipasi tantangan ke depan. Dengan pemikiran mendalam yang menjangkau jauh ke depan, program kerja GAPKI tidak harus berubah untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

Program kerja GAPKI diharapkan menjadi pondasi penting untuk mewujudkan *Industri Sawit Menuju Indonesia Emas 2045*. Peta jalan menuju harapan itu dapat dimulai sejak sekarang dengan menyusun roadmap sebagai salah satu langkah pembentukan badan sawit nasional atau badan otorita sawit. Dengan demikian, industri sawit nasional mempunyai pijakan yang kokoh untuk melangkah menuju era yang lebih baik.

Dalam Rakernas 2024 ini, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Ketua Dewan Pembina GAPKI Joe fly J. Bahroeny mengucapkan terima kasih kepada peserta Rakernas atas sumbang saran, ide, dan masukan untuk kebaikan organisasi dan industri. Untuk melangkah ke depan



### TUJUH PROGRAM UTAMA GAPKI

- 1 Kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif
- 2 Sustainability dan Sertifikasi (ISPO, dan lain-lain)
- 3 Advokasi, Diplomasi dan Promosi
- 4 Kemitraan dan Percepatan PSR
- 5 Ketenagakerjaan
- 6 Optimalisasi Organisasi dan Pelayanan Anggota
- 7 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Daya Saing

yang lebih baik, tidak ada jalan lain kecuali merapatkan barisan untuk bersatu dan bersama-sama mewujudkan kemajuan industri sawit nasional.

GAPKI juga mendorong pembentukan badan sawit nasional yang diwujudkan dalam bentuk penyerahan naskah berjudul

*Tantangan Industri Sawit dan Urgensi Pembentukan Badan Sawit* dari Ketua Dewan Pakar GAPKI Achmad Mangga Barani dan anggota Dewan Pakar kepada Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Sekjen GAPKI M. Hadi Sugeng. Naskah ini dipresentasikan oleh anggota Dewan Pakar GAPKI Prof. Bustanul Arifin di arena Rakernas. ■

# SATUKAN LANGKAH WUJUDKAN PROGRAM KERJA 2024-2025

**Semua peserta menyetujui keputusan ini dan disahkan menjadi keputusan Rakernas.**

Sebagai forum tertinggi organisasi setelah musyawarah nasional, Rakernas GAPKI yang berlangsung pada 21 Mei 2024 di Grand Mercure Bandung telah menghasilkan beberapa keputusan penting organisasi. Program kerja 2024-2025 menjadi pegangan bagi pengurus GAPKI pusat maupun cabang dalam menjalankan roda organisasi. Keputusan yang diambil ini merupakan hasil diskusi dan kajian dengan semangat mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang terjadi selama ini.

Perumusan program kerja 2024-2025 dilakukan setelah dilakukan evaluasi program kerja sebelumnya oleh seluruh peserta yang meliputi pengurus GAPKI pusat dan perwakilan dari 15 GAPKI cabang di seluruh Indonesia. Salah satu masalah utama yang muncul antara lain verifikasi lapangan oleh Sucofindo yang dinilai menyulitkan petani karena harus hadir saat sensus yang disampaikan oleh GAPKI Cabang Sumatera Utara. Untuk memudahkan petani mendapatkan dana PSR ini, GAPKI mengusulkan



cukup dilakukan *sampling* saja.

Sebagai organisasi yang mendukung percepatan PSR, anggota GAPKI memiliki dua pilihan yakni jalur kemitraan dan jalur dinas. Pemilihan di antara dua jalur ini diserahkan kepada masing-masing anggota GAPKI sesuai dengan kondisi di setiap daerah. Sebagian anggota GAPKI memilih jalur dinas karena dinilai lebih kondusif. Namun, tidak sedikit yang memilih jalur kemitraan karena peraturan daerah lebih akomodatif.

Selain percepatan PSR, muncul usulan agar pemerintah mewajibkan semua perusahaan sawit menjadi anggota GAPKI dan sertifikasi ISPO harus mendapatkan rekomendasi GAPKI. Usulan ini sebenarnya sudah pernah diupayakan namun belum terwujud. Meski demikian, usaha akan terus dilakukan dengan bantuan Dewan Pembina. Dalam sambutan penutupan, Dewan Pembina

mengusulkan artis Raline Shah agar menjadi Duta Sawit.

Beberapa topik yang dibahas akhirnya disahkan menjadi keputusan Rakernas. Namun, ada beberapa isu yang masih dalam pembahasan lebih lanjut. Tema lain seperti pembekuan anggota GAPKI cabang dan penyusunan *roadmap* tentang *Industri Sawit Menuju Indonesia Emas 2045* akan dirumuskan kemudian.

Sekjen GAPKI M. Hadi Sugeng yang memaparkan evaluasi program kerja 2023-2024 dan rencana kerja 2024-2025 menyatakan tidak ada masalah fundamental dalam pelaksanaan program kerja 2023-2024. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil roadshow ke berbagai GAPKI cabang untuk menginventarisir masalah organisasi. Sedangkan masukan seperti pembuatan kantor cabang sudah disampaikan dan akan dikaji lebih lanjut. ■





## IPOS FORUM 2024 HASILKAN 10 REKOMENDASI

*Tema ini menekankan percepatan PSR sebagai langkah strategis meningkatkan produksi CPO.*

**G**APKI Cabang Sumatera Utara sukses mengadakan event tahunan IPOS Forum (Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum). Tahun ini merupakan IPOS Forum ke-9 yang diselenggarakan di Hotel Santika Medan pada 30-31 Mei 2024.

Sebanyak 500 orang pemangku kepentingan sawit hadir dalam forum yang mengangkat tema *Dukungan Pemerintah Dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum Untuk Investasi Industri Sawit*. Tema ini menekankan percepatan peremajaan sawit rakyat sebagai langkah strategis meningkatkan produksi CPO.

Ketua GAPKI Sumatra Utara Timbas Prasad Ginting mengatakan IPOS Forum ke-9 diharapkan dapat merespon kebutuhan industri sawit dengan tepat.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah harmonisasi regulasi untuk mengatasi tantangan dalam percepatan PSR.

Karena itu, dibutuhkan integrasi kebijakan dan kerjasama antara

pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan industri sawit.

Terkait kebun sawit di kawasan hutan, dia berharap penyelesaian masalah ini dengan baik dan adil serta memastikan petani dengan lahan di bawah 5 hektar dikeluarkan dari kawasan hutan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Berangkat dari berbagai masalah dan isu serta usulan penyelesaian, IPOS Forum 2024 menghasilkan 10 rekomendasi dalam penyelesaian berbagai masalah di lapangan.

Sementara itu, Pejabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin sepakat dengan perlunya sinergi serta kepastian hukum karena perkebunan salah satu faktor penting yang diharapkan memberikan kekuatan besar dalam kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat kebun sawit tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tapi juga masyarakat di sekitar perkebunan dan masyarakat luas. ■

### 10 REKOMENDASI IPOS FORUM 2024

- 1** Penguatan Koordinasi dan Kelembagaan: Diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN, KLHK, Ditjenbun, termasuk dukungan BDPKPS.
- 2** Penyederhanaan Regulasi dan Persyaratan: Regulasi yang lebih sederhana dan transparan perlu diterapkan untuk meminimalkan hambatan birokrasi dan meningkatkan kepastian hukum.
- 3** Pengembangan Database dan Sistem Verifikasi.
- 4** Peningkatan Pendampingan dan Edukasi.
- 5** Pengalokasian Dana yang Efektif.
- 6** Penanganan Masalah Legalitas dan Kawasan Hutan.
- 7** Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dan Pejabat Birokrasi.
- 8** Kolaborasi antara Pemerintah, Akademisi, dan Pemangku Kepentingan.
- 9** Mengurai Simpul Birokrasi melalui Integrasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Regulasi.
- 10** Integrasi Kebijakan dan Kelembagaan untuk Keberlanjutan Industri Sawit termasuk pembentukan Badan Sawit Nasional.

# AKSELERASI PENGEMBANGAN SISTEM NASIONAL DASHBOARD KOMODITAS



Pengembangan *software National Dashboard for Commodities* (NDC) oleh pemerintah telah memasuki fase baru. Perangkat ketertelusuran terpadu beberapa komoditas strategis dan berorientasi ekspor ini memasuki tahap *piloting*. Sebelum percobaan dilakukan, Kemenko Bidang Perekonomian mengadakan *workshop* komite teknis dan komite pengarah untuk akselerasi pengembangan *software* ini Hotel Aryaduta Kuta, Bali pada 3-4 Juni 2024.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Direktur Eksekutif Mukti Sardjono, Ketua Bidang Luar Negeri M. Fadhil Hasan, dan anggota Dewan Pembina Joko Supriyono mewakili GAPKI dalam proyek pengembangan *software* NDC. Pemerintah membentuk komite teknis yang meliputi enam *workstream* antara lain pengembangan sistem ketelusuran rantai pasok komoditi perkebunan berkelanjutan, pengembangan ketelusuran kopi, kakao, karet, kayu, sawit, dan

kesekretariatan NDC.

Dari enam bidang untuk pengembangan alat ketelusuran ini, GAPKI masuk dalam 2 komite teknis. Pertama, Komite Teknis Bidang Pengembangan Sistem Ketelusuran Rantai Pasok yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Mukti Sardjono dan Kabid Luar Negeri M. Fadhil Hasan. Kedua, Bidang Pengembangan Keberlanjutan dan Ketelusuran Komoditi Sawit yang diwakili oleh Ketua Umum Eddy Martono dan anggota Dewan Pembina Joko Supriyono.

Sistem Nasional Dashboard nantinya merangkum data dan informasi dari semua pelaku di industri yang meliputi rantai pasok yakni petani, pekebun, perusahaan, broker/pengepul, pabrik pengolahan, transportasi, trader, terminal, pengolahan hilir dan transportasi negara tujuan. Pada setiap rantai pasok tersedia informasi terkait komoditas dengan fitur utama *traceability*, geolokasi, dan deklarasi

dokumen bebas deforestasi dan legalitas kebun.

Masing-masing pihak dalam rantai pasok komoditas kelapa sawit harus melengkapi data ketelusuran. Data *traceability* yang dibutuhkan untuk komoditas sawit antara lain Data E-STDB dan SIPERIBUN. Bagi petani dan pekebun, data ketelusuran yang diwajibkan sesuai dengan Formulir E-STDB Kementerian Pertanian. Sedangkan data ketelusuran untuk perusahaan kelapa sawit sesuai data dengan SIPERIBUN.

Untuk memastikan sistem ini berjalan baik, *piloting dashboard* untuk komoditas kelapa sawit diimplementasikan di Aceh, Riau, dan Kalimantan Tengah pada Juni-Juli 2024. Hasil evaluasi *piloting* akan dilaporkan pada Agustus 2024. Perbaikan dan penyempurnaan alat ini dilakukan pada September-Oktober 2024. Sistem Nasional *Dashboard* ini ditargetkan sudah diimplementasikan mulai 29 Desember 2024, sejalan dengan penerapan UEDR. ■

## SOSIALISASI BURSA CPO DAN BURSA KARBON DALAM KEBIJAKAN SAWIT



**Dari 48 anggota Bursa CPO Indonesia, lebih dari 80% merupakan anggota GAPKI.**

Sebagai wadah transaksi baru dalam perdagangan komoditas di Indonesia, pemahaman tentang seluk beluk Bursa CPO dan Bursa Karbon dalam kebijakan komoditas sawit perlu terus ditingkatkan. Bursa CPO Indonesia diresmikan oleh pemerintah pada 13 Oktober 2023. Sedangkan Bursa Karbon Indonesia diresmikan pada 26 September 2023. Tidak heran kalau pemahaman terhadap dua bursa ini perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap dua bursa tersebut, pemerintah mengadakan *Sarasehan Serial Kebijakan Sawit* dengan topik utama Bursa CPO dan Bursa Karbon. Acara ini diharapkan dapat mengurai dan memahami kompleksitas Bursa Karbon dan Bursa CPO pada serial kebijakan sawit.

Dalam kegiatan di Hotel Santika Jakarta pada 15 Mei 2024 ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Promosi dan Perdagangan Manumpak Manurung.

Beberapa pihak terkait yang hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Divisi Pendidikan SDM, Litbang dan Pengembangan Sarana Prasarana BDPKS Triana yang mewakili Direktur



Utama BDPKS Eddy Abdurrachman, Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita, Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung, Komisaris ICDX Fenny Wijaya, Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar, dan Sekjen Apkasindo Rino Afrino.

Pemerintah melalui Bappebti terus mendorong implementasi Bursa CPO karena komoditas ini sangat strategis dalam mendorong perdagangan dan meningkatkan ekonomi Indonesia. Untuk itu, para pelaku usaha CPO diminta berpartisipasi aktif dan memberi kontribusinya melalui transaksi CPO di Bursa Berjangka Indonesia. Hal ini menjadi momentum yang baik untuk penguatan CPO di dalam negeri.

Dalam sarasehan ini, Ketua Bidang Perdagangan GAPKI Manumpak Manurung mengatakan GAPKI

mendukung kebijakan pemerintah ini yang dibuktikan dengan kehadiran anggota GAPKI di Bursa CPO Indonesia. Dari 48 anggota yang terdaftar di Bursa CPO Indonesia, lebih dari 80 persen adalah anggota GAPKI. Sosialisasi yang konsisten diharapkan mendorong perusahaan CPO lain untuk menjadi anggota Bursa CPO.

Perdagangan berjangka di ICDX memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola risiko dengan lebih efektif. Dengan transaksi berjangka, pelaku usaha dapat mengunci harga potensial dari fluktuasi harga pasar, memastikan operasional bisnis lebih aman terhadap volatilitas pasar. Di sisi lainnya, ICDX diharapkan punya dampak positif bagi Indonesia, termasuk peningkatan pendapatan dari ekspor CPO dan menciptakan kesempatan kerja di industri sawit. ■

# PERKUAT RELASI MEDIA, GAPKI KUNJUNGI NARASI TV

*Sepanjang 2023,  
industri sawit mencatat  
tiga kemajuan bagi  
perekonomian negara.*

**K**ekuatan media sebagai saluran komunikasi perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun kepercayaan publik dan sosialisasi program organisasi. Apalagi media digital yang menjadi referensi masyarakat memiliki kecepatan dan visual yang menggambarkan kejadian nyata. Dengan peran strategis itu GAPKI terus membangun relasi dengan media, terutama media yang berdampak besar terhadap pembentukan persepsi masyarakat.

Salah satu langkah menjalin hubungan dengan media adalah mengadakan kunjungan media secara langsung. Setelah berkunjung ke beberapa media sebelumnya, GAPKI mengunjungi Narasi TV di Intiland Tower Jakarta pada 28 Mei 2024.



Kunjungan ini dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Direktur Eksekutif Mukti Sardjono, Wakil Ketua Umum III Satrija Budi Wibawa, Sekjen M. Hadi Sugeng, dan Komp. Media Relations Fenny Sofyan.

Pengurus GAPKI diterima oleh pendiri Narasi TV Najwa Shihab, COE Jovial da Lopez, dan Manajer Pemberitaan Laban Laisila. Narasi TV merupakan perusahaan rintisan di bidang jurnalisme dan media massa dengan konten dalam bentuk video, reportase, *talk show*, opini, ruang interaksi, dan lain-lainnya. Media yang berdiri pada 2018 ini memiliki cukup banyak penonton karena kekuatan kontennya.

Dalam pertemuan ini Ketua Umum GAPKI Eddy Martono memaparkan situasi terkini industri sawit nasional maupun global. Termasuk tantangan yang dihadapi komoditas sawit terkait dengan tantangan di dalam dan luar negeri.

Begitu juga kontribusi sawit terhadap ekonomi negara, terutama di masa pandemi. Salah satu tantangan besar industri sawit saat ini antara lain produksi yang stagnan di tengah pertumbuhan permintaan domestik yang meningkat.

Besarnya kontribusi sawit terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat dari devisa yang dihasilkan. Komoditas sawit merupakan penyumbang terbesar ekspor non-migas

Indonesia. Sepanjang 2023, industri sawit mencatat tiga kemajuan bagi perekonomian negara. Antara lain, mendorong nilai ekspor sebesar US\$ 32,93 juta, mendongkrak 53,19 juta ton produksi kelapa sawit, dan menambah cadangan devisa sebesar Rp600 triliun.

Dengan peran industri sawit yang signifikan, GAPKI memandang relasi dengan media perlu terus dikembangkan sehingga publik mendapatkan informasi yang utuh. Karena itu peranan media sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan bisnis sawit nasional. Salah satu dampak besar yang dirasakan adalah peningkatan kesejahteraan belasan juta petani sawit. ■



# SAWIT INDONESIA RAMAH ANAK DALAM REKAMAN KAMERA

*Pengambilan gambar dilakukan di dua lokasi yakni kebun PT Amal Tani dan PT Mustika Sembuluh.*



**G**APKI bersama JARAK, PAACLA Indonesia, dan PKPA menyusun panduan praktis dan praktik terbaik perlindungan anak di kebun sawit dalam bentuk film. Film berjudul *Sawit Indonesia Ramah Anak* ini diharapkan menjadi media sosialisasi tata kelola perkebunan kelapa sawit yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengambilan gambar dilakukan di dua lokasi yakni kebun PT Amal Tani dan PT Mustika Sembuluh.

Untuk pengambilan gambar film, Ketua Bidang Pengembangan SDM Sumarjono Saragih, Komp. Perlindungan Pekerja Perempuan Marja Yulianti dan Staf Sekretariat GAPKI Eko Tamba memberikan pendampingan. Tujuannya supaya gambar yang dihasilkan sejalan

dengan praktik terbaik tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

Syuting di area PT Amal Tani dilakukan pada 27 April – 6 Mei 2024 di Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat. Perusahaan sawit anggota GAPKI ini merupakan binaan PPKA (Pusat Kajian Perlindungan Anak).

Perusahaan dengan lahan sekitar 1.000 hektar ini dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam perlindungan anak.

Hal itu diwujudkan berupa larangan anak-anak masuk kebun sawit melalui penanda di seluruh area perkebunan.

PT Amal Tani juga menyediakan Rumah Momong, sarana penitipan anak pekerja selama orang tua mereka bekerja bagi perusahaan. Sarana penjemputan dan pengantaran anak ke sekolah dengan bus sekolah juga tersedia. Hak-hak anak diberikan sejak dalam kandungan. ibu hamil

berupa pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan perusahaan. Tumbuh kembang anak dari aspek permainan, kesenian, rekreasi, keagamaan juga dipenuhi oleh perusahaan.

Fasilitas dan sarana serupa juga disediakan PT Mustika Sembuluh, anak perusahaan Wilmar di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Melalui Yayasan Wilma Bina Bangsa, telah tersedia 19 sekolah yang terdiri dari 8 TK, 6 SD, 3 SMP, dan 2 SMA dengan total siswa 5.964 orang dan 275 guru. Semua sarana Pendidikan ini tersebar di dua kabupaten yakni Kotawaringin Timur dan Seruyan.

Status semua sekolah ini akreditasi A. Bahkan, SD Bina Bangsa berstatus sekolah penggerak yang disematkan oleh Kemenristekdikti.

Perusahaan ini punya Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan sarana olahraga. Kegiatan di berbagai sarana dan fasilitas inilah yang direkam sebagai bahan film. ■

## MEMPERKUAT KOMITMEN MENENTANG PEKERJA ANAK



**GAPKI mendorong anggotanya menjamin hak-hak anak dalam praktik bisnis di industri kelapa sawit.**

**G**APKI terus terlibat aktif dalam gerakan pencegahan dan menentang pekerja anak melalui berbagai aktivitas. Salah satunya adalah partisipasi GAPKI dalam peringatan *Hari Dunia Menentang Pekerja Anak* di Tebet Eco Park, Jakarta pada 9 Juni 2024. Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PAACLA, JARAK, dan Yayasan PKPA ini, GAPKI diwakili oleh Komp. Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak Marja Yulianti.

Pelaksanaan kegiatan ini cukup meriah. Dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah antara lain Asdep Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti, Direktur Ketenagakerjaan BAPPENAS Nur Hygiawati Rahayu, Kepala Seknas PAACLA Andi Akbar, Direktur Eksekutif JARAK Maria Clara Bastiani, dan Deputi Bid Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan

Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulityaningrum.

Kegiatan yang melibatkan masyarakat umum ini cukup meriah sehingga pesan penentangan terhadap pekerja anak diharapkan semakin besar dampaknya. Marja Yulianti yang mewakili GAPKI dan industri sawit menegaskan bahwa GAPKI mendukung program Sawit Indonesia Ramah Anak, menentang pekerja anak dan mendorong perusahaan anggota GAPKI untuk menjamin hak-hak anak dalam praktik bisnis di industri kelapa sawit.

*Hari Dunia Menentang Pekerja Anak* dirayakan untuk menegaskan komitmen dan peranan berbagai pihak untuk terlibat dalam penanggulangan pekerja anak. Selain itu, memberikan sarana bagi berbagai pihak menyampaikan praktik baik dalam penanggulangan pekerja anak.

Yang tidak kalah penting tentu saja memberikan ruang kreativitas bagi anak untuk terlibat dalam kampanye penanggulangan pekerja anak.

Peringatan *Hari Dunia Menentang Pekerja Anak* tahun ini juga bertepatan dengan 25 tahun pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan menjadi Konvensi ILO pertama yang diratifikasi secara universal. Peringatan dengan tema *Saatnya Mewujudkan Komitmen Kita: Akhir Pekerja Anak!* ini mengingatkan pentingnya implementasi Konvensi ILO 138 dan 182 terkait pekerja anak.

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulityaningrum perayaan ini harus dikuatkan gaungnya untuk mencapai salah satu target penting yakni Indonesia Bebas Pekerja Anak. ■



# INDUSTRI SAWIT BERKOMITMEN SEDIAKAN TEMPAT KERJA LAYAK



**Langkah ini sebenarnya sudah dilakukan oleh GAPKI sejak lama dan secara berkelanjutan dilakukan sampai sekarang.**

Setiap industri pasti memiliki tempat kerja yang layak untuk pengembangan sumber daya manusianya. Termasuk di dalamnya industri sawit yang menjadi sektor andalan ekspor Indonesia. Untuk mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan, BAPPENAS mengadakan diskusi dengan tema tempat kerja layak di perkebunan sawit di Hotel JS Luwansa Jakarta pada 7 Juni 2024.

Diskusi ini diikuti oleh peserta *Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LX* yang diadakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Pembicara dalam pelatihan ini adalah Koordinator Kelembagaan, Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan, Mula Putera dan *National Project Coordinator ILO* Yunirwan Gah.

Dalam diskusi ini GAPKI diwakili oleh Komp. Hubungan Industrial Memed Kosasih. Hasil diskusi ini

akan dituangkan dalam rekomendasi perbaikan ketenagakerjaan di industri sawit untuk dilaksanakan pada periode 2025-2029.

Pelatihan ini diadakan karena peserta pelatihan sedang menyusun *policy brief* dengan tema *Tata Kelola Investasi dalam Peningkatan Kesempatan Kerja*.

Isu utama yang diangkat adalah lapangan kerja yang layak di industri kelapa sawit. Identifikasi isu diarahkan pada beberapa hal antara lain status pekerja, upah, penerapan K3, jaminan kesehatan dan sosial, pekerja anak, serta peningkatan keterampilan dan pembekalan di luar pekerjaan utama.

Diskusi ini diharapkan dapat memetakan isu ketenagakerjaan di kebun sawit baik di tingkat teknis maupun kebijakan serta pemetaan kebijakan dan program untuk menangani isu-isu yang muncul serta kemajuan implementasinya. Hasil lain yang diharapkan adalah identifikasi gap kebijakan sebagai

bahan perbaikan dan keterkaitan rekomendasi untuk mendukung peningkatan produktivitas yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan terkait investasi sawit.

Dalam diskusi ini, Komp. Hubungan Industrial GAPKI Memed Kosasih menyampaikan GAPKI berkomitmen mempromosikan pekerjaan yang layak, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di perkebunan sawit dan secara bersama-sama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Karena itu, GAPKI mendorong anggotanya meningkatkan dialog sosial dengan serikat pekerja dan *stakeholder* lain dalam pelaksanaan tata kelola berkelanjutan.

Untuk melaksanakan tata kelola berkelanjutan, GAPKI terus mendorong anggotanya untuk menjalankan praktik K3 dan menjamin pemenuhan bagi pekerja termasuk pekerja wanita.

Langkah ini sebenarnya sudah dilakukan oleh GAPKI sejak lama dan secara berkelanjutan dilakukan sampai sekarang. GAPKI juga mendorong anggota memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ■





## LOMBA KARYA JURNALISTIK SAWIT 2024

**Institut Teknologi Sawit Indonesia Medan terpilih sebagai juara umum.**

Karya tulis menjadi salah satu faktor penting membangun citra positif industri kelapa sawit di tengah masyarakat. Karena itu, lomba karya jurnalistik tentang sawit memiliki makna penting bagi industri sawit nasional. Berangkat dari peranan inilah GAPKI selalu mendukung kampanye positif sawit. Untuk itu, GAPKI menghadiri seremoni dan pengumuman pemenang Lomba Karya Jurnalistik Sawit 2024 yang diadakan oleh Elaeis Media Group.

Dalam seremoni di Politeknik Kampar, Bangkinang, Riau pada 6 Mei 2024 ini, GAPKI diwakili oleh Wakil Ketua Umum III Satrija Budi Wibawa yang diminta menyerahkan hadiah kepada salah satu pemenang LKJS 2024. Lomba ini adalah rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) portal *elaeis.co* yang ke-5. Lomba dengan tema *Bangun Kreatifitasmu, Tuliskan Gagasanmu* dibagi menjadi tiga subtema yakni peran penting BPDPKS, sawit rakyat dan perusahaan, serta hebatnya sawit.

Lomba ini terbuka untuk umum dan mahasiswa, terutama mahasiswa penerima beasiswa sawit yang sedang belajar di 14 kampus penyelenggara beasiswa sawit. Pengumpulan karya tulis dimulai sejak 12 Maret 2024 hingga 19 April 2024. Total hadiah mencapai Rp 40 juta dan memperebutkan Piala Bergilir dari Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian.



PEMENANG LKJS 2024

### KATEGORI UMUM



**JUARA 2**

M. Arfah



**JUARA 3**

Melba Ferry Fadly



**HARAPAN 1**

Widya Sinta Mustika



**HARAPAN 2**

Supadilah

### KATEGORI MAHASISWA



**JUARA 2**

Kania Yustika Pakpahan



**JUARA 3**

Nursyafitri Siregar



**HARAPAN 1**

Muh Tegar Noval Ilham



**HARAPAN 2**

Robet Ginting

Total peserta lomba 277 orang dengan 307 karya jurnalistik.

Peserta kategori mahasiswa sebanyak 189 orang dengan jumlah karya 203 artikel. Adapun kategori umum, ada 88 peserta dengan jumlah karya 104 artikel.

Setelah melewati penilaian dewan

juri, Institut Teknologi Sawit Indonesia Medan terpilih sebagai juara umum. Kampus ini mengirimkan peserta terbanyak, yaitu 45 orang. Sebagai juara umum, ITS menerima Piala Bergilir dari Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian. ■

# POLA KEMITRAAN TINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI

*Kemitraan adalah keterpaduan kolaborasi antara beberapa stakeholder terkait sangat penting, baik perusahaan itu sendiri maupun masyarakat.*

Kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit menjadi perhatian penting perusahaan sawit karena berdampak bagi perusahaan maupun masyarakat. Salah satu cara memberikan perhatian kepada mereka adalah membangun kemitraan. Topik ini menjadi tema seminar nasional dengan tema *Kemitraan Kelapa Sawit Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tertinggal Sekitar Kebun* di Hotel Ibis Pontianak City Center pada 16 Mei 2024.

Seminar yang diadakan oleh Media Perkebunan ini menghadirkan Komp. Percepatan PSR GAPKI Muhammad Iqbal sebagai pembicara. Tokoh lain yang hadir antara lain Direktur

Konsentrasi pemerintah saat ini menghubungkan antara perusahaan dan masyarakat melalui kemitraan agar bisa jadi lebih baik.

Sawit dan Palma Lainnya Adi Praptono, Koordinator Kelembagaan, Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Mula Putera dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalbar, Ignatius IK.

Salah satu poin penting pembahasan seminar terkait Permentan 18 Tahun 2021 tentang FPKM membantu mempermudah pola kemitraan menjadi upaya peningkatan kesejahteraan petani sawit. Menurut Mula Putera, konsentrasi pemerintah saat ini menghubungkan antara perusahaan dan masyarakat melalui kemitraan agar bisa jadi lebih baik. Ada dua hal yang dilakukan yakni menyentuh sisi regulasi yakni Permentan 18 Tahun 2021 dan sentuhan program yaitu dari sisi tanamannya lalu menyentuh manusianya.

Mula Putera menegaskan bahwa hubungan kerja sama antara perusahaan dan pekebun yang berkelompok tidak hanya untuk pembangunan namun juga mengelola dalam jangka waktu tertentu dan dengan prinsip saling menguntungkan. Kebijakan FPKM diberikan pada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan pekebun berbasis komoditas kebun baik kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani dan koperasi.



Menurutnya, pekebun harus berkelompok karena banyak manfaatnya. Salah satunya dengan membentuk kemitraan Pola Inti Rakyat (PIR) yang sangat cocok antara perusahaan dan petani. Terkait dengan beberapa kendala seperti implementasi di lapangan yang kurang harmonis, tentunya tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak bermitra. Sebab, kemitraan itu merupakan keniscayaan. Ia juga meminta agar pekebun sawit dijadikan subjek bukan objek.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat Ignatius IK menegaskan kemitraan adalah keterpaduan kolaborasi antara beberapa stakeholder terkait sangat penting, baik perusahaan itu sendiri maupun masyarakat. ■





## GAPKI PERKUAT MISI DAGANG INDONESIA KE CHILE

**Business matching menghasilkan potensi transaksi USD 7,45 juta atau Rp 119,2 miliar.**

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mempresentasikan komoditas sawit kepada para pelaku bisnis dalam *Forum Bisnis Indonesia-Chile* di Hotel Intercontinental Santiago, Chile pada 9 Mei 2024. Berbagai manfaat dan keunggulan sawit menjadi fokus pembahasan. Melalui forum bisnis ini diharapkan pertukaran perdagangan berbagai komoditas, terutama sawit, antara Indonesia dan Chile semakin berkembang.

Forum Bisnis Indonesia-Chile ini diawali dengan remarks dari Duta Besar RI Santiago dan *President Chile-Indonesia Business Council (chapter Chile)*, dilanjutkan dengan paparan oleh Dirjen PPI dan Dirjen PEN. Sebanyak 9 perwakilan perusahaan Indonesia yang berpartisipasi juga menyampaikan paparan tentang produk unggulan yang dipasarkan. Dalam kegiatan ini GAPKI memaparkan komoditas sawit.

Forum bisnis ini dibuka oleh Direktur Jenderal Pengembangan

Ekspor Nasional, Didi Sumedi sebagai rangkaian dari kegiatan Misi Dagang Indonesia ke Chile pada 9–10 Mei 2024. Misi ini bertujuan meningkatkan akses pasar produk Indonesia ke Amerika Selatan melalui pemanfaatan perjanjian *Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)*. Perjanjian ini langkah strategis pemerintah mendorong produk Indonesia bersaing di pasar Chile.

Selain forum bisnis, kegiatan misi dagang ini juga mencakup business matching, pertemuan dengan *Federation of Chilean Industry (SOFOFA)* dan pejabat Kemlu Chile, serta *company visit* ke Cross Mountain dan Cencosud. Kegiatan *business matching* menghasilkan potensi transaksi senilai USD 7,45 juta atau Rp 119,2 miliar yang berasal dari produk kelapa sawit dan turunannya, suku cadang kendaraan bermotor, dan plastik kemasan.

Minat pebisnis Chile terhadap



produk Indonesia cukup besar dengan banyaknya permintaan *one on one business matching* dengan pebisnis Indonesia, antara lain sawit dan turunannya. Chile adalah *hub* perdagangan di Kawasan Amerika Latin dengan potensi pasar 659,3 juta jiwa yang memiliki 34 FTA di 64 negara. Melalui misi dagang ini, Indonesia berupaya untuk meningkatkan ekspor ke Chile. Pengusaha di kedua negara diharapkan dapat memanfaatkan *framework* IC-CEPA. ■

# SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL PRODUK CPO

**CPO adalah produk yang dihasilkan oleh sawit di mana dalam proses produksinya tidak bersinggungan produk nonhalal.**

**G**APKI berencana mengirim surat kepada Kementerian Agama terkait ketentuan produk CPO yang harus memiliki sertifikat halal. Rencana ini terungkap dalam *Sosialisasi Sertifikasi Halal Produk CPO* di Jakarta pada 13 Mei 2024. Acara yang berlangsung secara hybrid ini diikuti 191 orang. Sosialisasi disampaikan oleh Siti Aminah, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Kementerian Agama dan dipandu oleh Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono.

Jaminan produk halal di Indonesia diatur oleh PP No. 39 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari Pasal 48 dan 185 UU Cipta Kerja. Ketentuan ini mengatur semua produk makanan, minuman, dan lain-lain yang tidak dikecualikan harus memiliki sertifikat halal. Sertifikat ini harus dipenuhi sebelum Oktober 2024. Dalam SK Kemenag No.1360 tahun 2021, CPO tidak termasuk produk yang dikecualikan sehingga wajib mendapatkan sertifikat halal.

Dalam pandangan GAPKI, semestinya CPO termasuk yang dikecualikan sehingga tidak perlu



**Dengan cara ini, akan terlihat perbedaan signifikan antara produk CPO dan produk hilir sawit.**

mendapatkan sertifikat halal. CPO adalah produk yang dihasilkan oleh kelapa sawit di mana dalam proses produksinya tidak bersinggungan atau tercampur produk nonhalal. Hal ini berbeda dengan produk hilir sawit seperti mentega, minyak goreng, dan sejenisnya yang butuh pencampuran dengan bahan lainnya sehingga wajib mendapatkan sertifikat halal.

Untuk meyakinkan Kementerian Agama, GAPKI mengusulkan Tim Kemenag dalam melihat langsung proses produksi CPO dari tandan buah segar (TBS) hingga menjadi

minyak sawit mentah (CPO). Tim Kemenag dapat mengunjungi salah satu pabrik kelapa sawit anggota GAPKI seperti Group Sinar Mas, Asian Agri, Astra Agro Lestari, atau yang lainnya. Dengan cara ini, akan terlihat perbedaan signifikan antara produk CPO dan produk hilir sawit.

Meski demikian, GAPKI memandang positif sosialisasi sertifikat halal ini karena memberikan pencerahan terkait proses sertifikasi. Saat ini, terdapat 71 lembaga sertifikasi halal yang dapat dimanfaatkan oleh produsen makanan, minuman, dan lain-lainnya. Proses sertifikasi halal memerlukan waktu 21 hari dengan biaya Rp 12,5 juta, belum termasuk transportasi dan auditor.

Untuk mendapat sertifikat halal setiap perusahaan diminta menyediakan Penyelia Halal. Biaya pelatihan penyelia sendiri sekitar Rp 3 juta per orang selama empat hari. ■



# PILKADA SERENTAK DIHARAPKAN BERDAMPAK POSITIF PADA DUNIA USAHA

*Semakin peduli kepala daerah terhadap sawit, semakin besar potensi kesejahteraan rakyat diwujudkan.*

Pemilihan kepala daerah secara serentak pada November 2024 nanti menjadi perhatian semua pihak, terutama oleh kalangan industri. Hajat demokrasi untuk memilih kepala daerah ini diharapkan menjadi stimulus peningkatan investasi serta perekonomian daerah dan negara. Karena itu, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah berpartisipasi aktif dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah.

Diskusi dengan tema Mengawal Pilkada Serentak Kalteng 2024: Pilkada Sukses, Keamanan Terjaga ini menghadirkan sejumlah tokoh antara lain Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo yang menyampaikan pesan tertulis Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. Dalam diskusi ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Advokasi & Hukum Muchtar Tanong.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran



mengatakan sukses Pilkada 2024 serentak merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, setiap elemen masyarakat didorong berpartisipasi aktif dan mengawal pesta demokrasi ini. Bagi PWI Kalteng, diskusi publik ini merupakan bagian dari sosialisasi Pilkada sekaligus mencegah pemberitaan negatif yang merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Pemilihan kepala daerah yang tertib, aman, dan lancar adalah harapan bersama. Kepala daerah yang terpilih secara demokratis dan mendapatkan legitimasi masyarakat diharapkan dapat membangun kepercayaan yang kokoh kepada pemerintah. Kondisi ini sangat penting bagi dunia usaha yang membutuhkan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum serta dukungan untuk dunia usaha.

Sebagai salah satu provinsi

penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, sukses pemilihan kepala daerah sangat penting bagi industri sawit. Total luas lahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah mencapai 2,2 juta hektar. Ratusan unit usaha perkebunan kelapa sawit beroperasi di daerah ini ditambah 191 PBS. Karena itu, dampak perkebunan sawit terhadap kesejahteraan masyarakat sangat terasa.

Kepala daerah hasil pilihan serentak pada November 2024 nanti diharapkan menumbuhkan iklim investasi yang kondusif dan memberi jaminan keamanan sehingga investor tidak ragu menanamkan modalnya di Kalimantan Tengah. Semakin peduli kepala daerah terhadap sawit, semakin besar potensi kesejahteraan rakyat diwujudkan. Keamanan yang menjadi masalah rawan, diharapkan rampung dengan terpilihnya kepala daerah yang baru. ■



## MERUMUSKAN STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI SAWIT

**GAPKI juga mengusulkan pembenahan di dalam negeri terkait kepastian usaha dan investasi.**

Untuk menghadapi tantangan global komoditas kelapa sawit, Kementerian Luar Negeri RI mengadakan diskusi terbatas perumusan strategi diplomasi ekonomi terkait industri sawit. Diskusi di Nusa Dua, Bali pada 22 Mei 2024 ini dihadiri Menlu Retno Marsudi, Duta Besar Indonesia di negara-negara Eropa dan perwakilan industri sawit. Dalam diskusi ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Umum Eddy Martono dan Ketua Bidang Luar Negeri M. Fadhil Hasan.

Diskusi ini bertujuan menjangkau pendapat tentang isu, tantangan, sampai strategi penguatan industri sawit nasional. Isu yang digali juga meliputi pemetaan kebutuhan pasar potensial dan alternatif serta penyusunan strategi khusus setiap negara/kawasan.

Yang tidak kalah penting isu tentang *market and policy intelligence* kondisi setempat, yakni: *supply chain CPO* dan turunannya, situasi negara konsumen target, dan penggalangan stakeholders terkait.

Dalam beberapa tahun terakhir, kampanye negatif sawit mengalami perubahan *trend* dari isu kesehatan dan HAM berubah menjadi isu lingkungan.

Adapun proliferasi kebijakan perdagangan berbasis lingkungan yang diterapkan oleh negara importir semakin meningkat antara lain *EU Deforestation-Free Regulation* (2023), *US Executive Order on Strengthening*

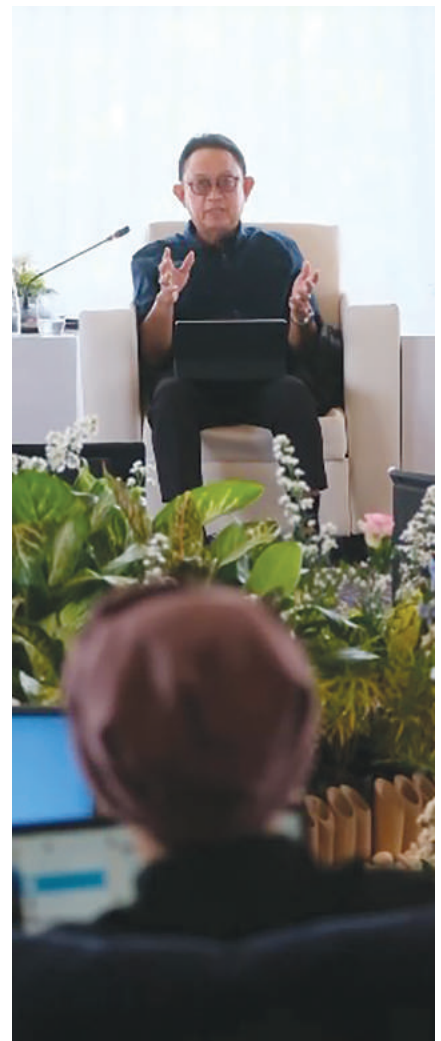
*the Nation's Forests* (2022), dan *UK Environment Act* (2021).

Sebagai komoditas andalan ekspor yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi negara, diplomasi sawit menjadi prioritas diplomasi ekonomi Indonesia. Sebagai komoditas minyak nabati paling efisien dan produktif dibandingkan minyak nabati lainnya menyebabkan sawit menjadi sasaran kampanye negatif, diskriminasi, dan hambatan perdagangan negara lain.

Dalam diskusi ini, GAPKI menyampaikan pentingnya koordinasi lebih erat antara industri dan pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri terkait diplomasi ekonomi. Di sisi lainnya pemerintah dan dunia usaha mau tidak mau harus mengantisipasi berbagai aturan yang dikeluarkan oleh negara-negara importir dan meresponnya secara proaktif. Sertifikasi ISPO yang diakui dunia internasional salah satu yang harus diselesaikan.

Langkah antisipasi yang tidak kalah penting tentunya melakukan diversifikasi pasar ekspor produk sawit sehubungan dengan aturan yang menghambat ekspor sawit ke negara-negara tertentu.

GAPKI juga mengusulkan pembenahan di dalam negeri terkait kepastian usaha dan investasi. GAPKI juga mengusulkan evaluasi perundingan CEPA Indonesia-EU agar dapat dijadikan referensi dalam CEPA Indonesia-EU. ■



# AUDIENSI RENCANA PENERAPAN KEBIJAKAN LAND APPLICATION

***Ditjen PPKL meminta perusahaan sawit menurunkan emisi GRK dan BOD di kolam POME.***



Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian LHK meminta GAPKI membantu menyiapkan *roadmap* penanganan air limbah pengolahan sawit (POME) untuk dibahas bersama Ditjen PPKL. Permintaan ini disampaikan oleh Dirjen PPKL Sigit Reliantoro dalam audiensi GAPKI dengan Ditjen PPKL di Kantor Kementerian LHK pada 14 Juni 2024. Audiensi ini membahas rencana penerapan kebijakan *Land Application* (LA) untuk mengejar target penurunan gas rumah kaca (GRK) tahun 2030.

Audiensi ini diikuti oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Kabid. Sustainability Bambang Dwi Laksono, Komp. Kehutanan I Nyoman Suyasa, Tim Task Force Land Application GAPKI, perwakilan PT Smart Tbk, dan peneliti PPKS Muhammad Ansori Nasution. Dalam audiensi ini, GAPKI membahas revisi Permen LHK Nomor 5 tahun 2021 tentang aspek teknis dan kelayakan dalam pengendalian limbah pengolahan kelapa sawit.

*Land Application* sangat penting karena Indonesia turut meratifikasi Perjanjian Paris yang mewajibkan negara menyampaikan *Nationally*

*Determined Contributions* (NDC) yang berisi target penurunan GRK hingga 2030. Karena itu, Ditjen PPKL meminta perusahaan sawit menurunkan emisi GRK dan BOD di kolam POME menggunakan teknologi atau membangun *methane capture*. Ditjen PPKL akan melobi Pertamina untuk membeli gas metannya.

Untuk memanfaatkan LA, Ditjen PPKL menargetkan penurunan BOD secara signifikan yakni <100 mg/L. Sedangkan *solid*, *sludge*, dan *cake*

dapat dipisah untuk menjadi pupuk kompos.

Berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu limbah cair untuk industri minyak sawit ditetapkan *standard* BOD adalah 100 mg/L. Untuk kepentingan ini Ditjen PPKL minta GAPKI membantu menyiapkan *roadmap*-nya.

Selain itu, Ditjen PPKL juga meminta GAPKI membuat daftar perusahaan anggotanya yang sedang mengajukan pengurusan persetujuan teknis (Pertek) *Land Application* atau tengah mengajukan perubahan kegiatan atau pengurusan baru di Ditjen PPKL.

Dalam pengajuan Pertek LA, perusahaan diminta memasukan program pengurangan atau reduksi emisi dan pengurangan BOD secara signifikan.

Dalam program penurunan GRK berdasarkan Konferensi Perubahan Iklim Ke-27 di Mesir pada 2022 mewajibkan setiap negara menyampaikan NDC kedua. Jangka waktu penyusunan NDC kedua tidak lebih dari Maret 2025. Target NDC harus sesuai skenario mempertahankan kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi secara global tidak lebih dari 1,5 derajat celsius. ■



# GAPKI SAMPAIKAN USULAN DALAM RAPAT EVALUASI DMO

*GAPKI mengusulkan peninjauan ulang volume DMO dari 280.000 ton menjadi 120.000 ton per bulan.*

Sejak diberlakukan pada 23 Mei 2022, kebijakan kebijakan Domestik Public Obligation (DMO) dievaluasi secara berkala. Evaluasi terbaru dilakukan pada 29 Mei 2024 dengan mengundang sejumlah pihak, antara lain GAPKI yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum III Satrija Budi Wibawa, Ketua Bidang Agro Industri Rapolo Hutabarat, Komp. Hubungan Luar Negeri Seruni Rhea Sianipar, dan Komp. Litigasi Luar Negeri Norman Fajar Wibowo.

Rapat evaluasi di Kementerian Perdagangan ini membahas ketentuan DMO dalam program Minyak Goreng Rakyat, Harga Eceran Tertinggi (HET), dan keberadaan minyak curah dalam program tersebut. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, target DMO minyak goreng sejumlah 300.000 ton belum tercapai sejak September 2023. Per April 2024, realisasi DMO 151.158 ton yang terdiri dari 82.463 ton Minyakita dan 68.695 ton minyak goreng curah.

Dalam rapat ini, GAPKI menghormati dan mendukung kebijakan pemerintah tentang DMO untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar domestik. Kebijakan yang diambil di tengah

kelangkaan minyak goreng dua tahun lalu itu cukup membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat prasejahtera. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, pemerintah memang harus hadir membantu fakir miskin.

Menurut GAPKI, minyak goreng murah memang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera. Apalagi pemerintah sudah memiliki data mereka berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan demikian, distribusi minyak goreng murah semakin tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh mereka.

Namun, di sisi lain GAPKI juga memandang pentingnya pemerintah menjamin iklim investasi yang kondusif melalui konsistensi regulasi bagi semua pihak. Sehingga tidak sampai terjadi distorsi kebijakan dan regulasi menjadi pegangan bersama. Bagi pengusaha, jaminan iklim investasi yang kondusif akan membuat kontribusi mereka kepada masyarakat semakin besar dan signifikan.

Di rapat ini, GAPKI mengusulkan peninjauan ulang volume DMO dari 280.000 ton menjadi 120.000 ton per



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, pemerintah memang harus hadir membantu fakir miskin.

bulan. Selain itu, harga DMO juga perlu disesuaikan karena perubahan-perubahan kondisi dalam beberapa waktu belakangan ini. Untuk itu, evaluasi terhadap HET perlu dilakukan. GAPKI juga menyampaikan kepada kementerian lain agar regulasi sertifikasi halal untuk CPO tidak sampai menghambat industri sawit dari hulu hingga hilir. ■





## PEMERINTAH DIMINTA MENGAJUKAN PENUNDAAN EUDR

**Kebijakan EUDR untuk industri dimulai pada Januari 2025 dan petani pada Juni 2025.**

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri GAPKI M. Fadhil Hasan mendorong pemerintah untuk mengajukan penundaan implementasi Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR) kepada Uni Eropa. Dorongan ini dilandasi oleh perkiraan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan

EUDR pada perusahaan dan petani. Masukan ini disampaikan di *CPOPC International Smallholders Meeting 2024* yang diadakan oleh CPOPC di Hotel Novotel, Palembang pada 6 Juni 2024.

Pertemuan dengan tema *Enhancing Productivity of Smallholders Through Tecnological Enhancement* ini dihadiri oleh asosiasi petani sawit di Indonesia, Kementan, Kemenko Perekonomian, dan Sekreariat ISPO.

Begitu juga perwakilan anggota CPOPC seperti Malaysia, Papua New Guinea, dan Honduras. Tema utama yang dibahas soal produktivitas dan dampak EUDR terhadap petani di negara-negara penghasil komoditas sawit.

Kebijakan EUDR untuk industri akan diimplementasikan dimulai pada Januari 2025. Adapun untuk petani pada Juni 2025. Sejauh ini, tidak ada perubahan ketentuan EUDR meskipun Uni Eropa baru menyelesaikan pemilihan umum. GAPKI menyoroti ketentuan *benchmarking* kategorisasi negara produsen yang dianggap

rawan melakukan deforestasi yang ditiadakan dan diubah menjadi menjadi netral.

Sementara itu, Sekjen CPOPC Rizal Affandi Lukman mengatakan negara-negara penghasil komoditas sawit punya waktu hanya enam bulan menghadapi implementasi EUDR. Karena itu, dia mengajak semua pihak untuk memperhatikan aspek-aspek yang akan mereduksi kesejahteraan petani. Tekanan kepada petani sawit harus disikapi dengan bijak sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Wakil Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia, Datuk Yusran Shah mengatakan pihaknya berusaha meningkatkan produktivitas petani sawit sebagai respon pada tantangan ke depan. Peningkatan produktivitas dibarengi dengan kemampuan petani dalam menjaga lingkungan sehingga menciptakan komoditas sawit berkelanjutan. Inilah kunci menghadapi penerapan EUDR ke depan.

Di sisi lain, Wakil Menteri Pertanian Honduras, Roy Lazo Rodriguez mengatakan problem petani sawit di negaranya adalah hambatan infrastruktur yang membuat mereka kesulitan menjual buah sawit. Kesulitan ini bisa semakin besar ketika EUDR diterapkan. Karena itu, pemerintah Honduras berfokus pada perbaikan infrastruktur sebagai bagian dari proses melestarikan lingkungan. ■



# INDONESIA-JERMAN DORONG PENYELESAIAN PERUNDINGAN IEU-CEPA

*Seruan Penundaan EUDR didukung 20 dari 27 negara dalam Agriculture Fisheries Council Configuration (AGRIFISH).*



dan fleksibel mencapai solusi yang disepakati bersama.

Menurut Wamendag Jerry Sambuaga, Indonesia sudah minta Jerman untuk menyampaikan kepada negosiator Uni Eropa agar fleksibel dalam mencapai solusi yang disepakati bersama. Semangat mencapai solusi bersama ditunjukkan juga oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz yang berharap perundingan IEU-CEPA segera selesai.

Dalam pertemuan ini pemerintah Indonesia memaparkan kesiapan bekerja sama dengan Jerman dan anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* yang lainnya, khusus untuk implementasi Program Kerja Bersama OECD-Indonesia 2022–2025.

Indonesia juga meminta dukungan berkelanjutan dari Jerman untuk langkah selanjutnya seperti peta jalan akses, tinjauan teknis, dan kegiatan lain untuk memenuhi persyaratan aksesnya, termasuk semua dukungan sumber daya yang diperlukan. ■

**D**elegasi Indonesia memaparkan dampak negatif EUDR bagi petani sawit dan komoditas pertanian lainnya di negara-negara penghasil komoditas pertanian. Karena itu, Indonesia menyerukan penundaan penerapan EUDR dalam pertemuan bilateral dengan pemerintah Jerman di Jerman pada 6 Mei 2024.

Seruan ini sejalan dengan 20 dari 27 negara yang hadir dalam *Agriculture Fisheries Council Configuration (AGRIFISH)* di Jerman. Seruan penundaan termasuk berasal dari Amerika Serikat dan Jerman.

Dalam pertemuan bilateral ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menemui Wakil Kanselir sekaligus Menteri Perekonomian dan Aksi Iklim Republik Federal Jerman Robert Habeck. Dalam pertemuan ini GAPKI diwakili oleh anggota Dewan Pembina Joko Supriyono. Desakan kepada Uni

Eropa diharapkan semakin meluas sebelum undang-undang yang melarang konsumen di Eropa membeli produk yang dinilai terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan.

Pertemuan bilateral Indonesia-Jerman ini membahas potensi kerja sama di bidang industri, perdagangan dan investasi, energi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Indonesia juga mengangkat penyelesaian perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*. Pemerintah Indonesia mendesak Uni Eropa mengadopsi pendekatan pragmatis



# PULUHAN ANGGOTA GAPKI SALURKAN BANTUAN KORBAN BANJIR DI LUWU UTARA

*21 perusahaan anggota GAPKI dan BUMN menghimpun bantuan logistik untuk meringankan beban mereka.*

**B**anjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 9 Mei 2024 menyebabkan kerusakan infrastruktur dan rumah penduduk. Akses jalan juga terputus sehingga tidak dapat dilalui masyarakat. Akibatnya, banyak warga yang mengungsi untuk menghindari dampak lebih besar. Kondisi ini mendorong 21 perusahaan anggota GAPKI dan BUMN menghimpun bantuan logistik untuk meringankan beban mereka.

Paket bantuan korban banjir berupa kebutuhan pokok yang terdiri dari beras, susu, minyak, gula dan kebutuhan pangan lainnya. Paket bantuan didistribusikan ke daerah-daerah yang terkena dampak bencana. Daerah yang terdampak antara lain Sabbang Selatan, Sabbang, Malangke, Malangke Barat, Baebunta Selatan, Sukamaju Selatan, dan Mappideceng. Total ada 35 desa banjir dan 58.614 warga yang terdampak.

Ketua GAPKI Cabang Sulawesi



Dony Yoga Perdana mengatakan GAPKI berkomitmen berada di garis terdepan membantu korban bencana. GAPKI akan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki untuk membantu meringankan beban korban banjir dengan memberikan bantuan logistik untuk kebutuhan sehari-hari. Sembako menjadi prioritas karena akses menuju daerah terdampak terputus sehingga pasokan bahan makanan terputus juga.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan selain berada di garda terdepan memberi bantuan, GAPKI juga akan berada di garis terdepan mendukung upaya pemulihan pasca-bencana dan memperkuat kerjasama dengan pihak terkait. Karena itu, GAPKI memastikan keberlanjutan bantuan untuk diberikan kepada mereka yang

membutuhkan.

Sebagai organisasi pengusaha yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi, GAPKI selalu hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam kondisi bencana, namun juga dalam kondisi normal dengan berbagai programnya. Pemberian bantuan korban bencana merupakan salah satu program GAPKI yang sudah dijalankan di berbagai daerah dan skala.

Sementara itu, Kadarusman Samad selaku Kepala Desa Ulusatu, Kecamatan Latimojong menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan GAPKI. Bantuan paket logistik ini memberikan harapan dan kelegaan bagi masyarakat desa korban bencana di tengah-tengah kesulitan yang sedang dialami. ■





## MENUJU PAPUA EMAS 2045 BERSAMA SAWIT

*Pengembangan sawit di Papua diharapkan menjadi contoh sukses praktik terbaik dijalankan.*

Tanah Papua memiliki potensi sangat besar untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Beberapa perusahaan telah merintis jalan ini, Sembilan di antaranya adalah anggota GAPKI Cabang Papua. Mengenalkan sawit ke tanah Papua tidak sama dengan daerah lain sehingga dibutuhkan pemahaman yang utuh tentang kelapa sawit. Untuk itu, GAPKI mengadakan promosi Sawit Indonesia Ramah Anak (SIRA) dalam bentuk seminar dan *workshop* pada 5-6 Juni 2024 di Jayapura. Tema yang diangkat adalah *Papua Emas 2045 Bersama Sawit*.

Kegiatan hasil kolaborasi antara GAPKI dan PAACLA ini dihadiri oleh Kabid Pengembangan SDM Sumarjono Saragih, Komp. Perlindungan Pekerja Perempuan Marja Yulianti, Komp. Media Relations Fenny Sofyan, Sekretaris II Syahril Mahmud serta GAPKI Cabang Papua. Hadir pula Kepala Divisi Perusahaan BDPKPS Achman Maulizal, perwakilan Kementerian PPPA, serta pejabat Pemerintah Provinsi Papua.

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan 9 perusahaan anggota GAPKI Cabang Papua lebih dari 100 peserta ini merupakan yang pertama di Papua. Asisten Bid. Perekonomian

Setda Provinsi Papua Setyo Wahyudi mengapresiasi kegiatan GAPKI. Pengembangan kelapa sawit di Papua diharapkan menjadi contoh sukses praktik terbaik dijalankan, terutama penghormatan pada masyarakat adat dan perlindungan hak anak-anak selain aspek ekonomi.

Sementara itu, Ketua GAPKI Cabang Papua Tulus Sianipar menegaskan bahwa 9 perusahaan anggota GAPKI Papua selalu mematuhi setiap peraturan yang berlaku, termasuk menjunjung praktik baik di perkebunan kelapa sawit. Total tenaga kerja yang terserap oleh 9 perusahaan anggota GAPKI Papua mencapai 40 ribu orang. Dia menyayangkan narasi kampanye negatif di media sosial yang tidak selalu menyudutkan komoditas sawit.

Dalam pemaparan materinya, Kabid Pengembangan SDM Sumarjono Saragih menegaskan GAPKI berkomitmen penuh menjalankan program sawit ramah anak. Perlindungan kepada mereka juga diberikan secara maksimal, termasuk kampanye perlindungan anak secara berkesinambungan. Buku panduan perlindungan anak di perkebunan kelapa sawit terus disesuaikan dengan kebutuhan terkini.



Industri sawit di Papua mengambil langkah konkrit dengan memberikan layanan pendidikan hingga kesehatan seperti klinik di setiap area perkebunan, klinik berjalan, pembangunan sekolah dan bus sekolah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Kegiatan semacam ini perlu didokumentasikan dan dipublikasikan kepada publik. ■

# PERKUAT PENCEGAHAN KARHUTLA, GAPKI SUMSEL SELENGGARAKAN TOT



*Sanksi bagi pembakar hutan dan lahan adalah pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar.*

Pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menegak dampak lebih luas. Untuk memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla, GAPKI Sumatera Selatan mengadakan (TOT) yang diikuti oleh 31 peserta dari 23 perusahaan anggota GAPKI Sumsel. Pelatihan yang diadakan pada 5-7 Juni 2024 di kantor PTPN I Regional 7 Palembang ini adalah TOT angkatan ke-11.

Instruktur pelatihan berasal dari Korem 044 Garuda Dempo yang menyampaikan materi kegiatan fisik, mental, dan disiplin ragu pemadam kebakaran. Sedangkan materi peraturan perundang-undangan terkait kebakaran

diberikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Materi keselamatan kerja dan P3K di daerah operasi disampaikan oleh Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel.

Untuk pemetaan GPS dan HT dipaparkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Pengendalian gulma dan tata kelola air disampaikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Materi yang disampaikan tidak hanya teori di dalam kelas, tapi juga praktik di lapangan.

Sebagai pelatihan untuk pelatih, salah satu fokus penekanan materi tentang regulasi yang melarang pembakaran hutan dan lahan secara sengaja untuk tujuan pembukaan lahan. Hal ini diatur dalam berbagai perundangan seperti UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU 32/2009 PPLH dan UU 39/2014

Tentang Perkebunan. Membakar hutan dan lahan secara sengaja untuk pembukaan lahan dapat dipidana dengan hukuman berat.

Sanksi bagi pembakar hutan dan lahan adalah pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar. Sedangkan di pasal lain termaktub pelanggaran karena kelalaian diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp1,5 miliar. Membakar hutan dan lahan berdampak pada kerusakan ekosistem dan menyebabkan polusi lingkungan.

Ketua GAPKI Sumatera Selatan Alex Sugiarto mengatakan GAPKI Sumsel dan Polda Sumsel sepakat untuk bersama-sama mencegah karhutla. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sudah terjalin untuk peningkatan sistem pengamanan dan penegakan hukum di area kerja perusahaan anggota GAPKI. ■





## GAPKI DORONG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI CPO

***Produksi minyak sawit untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 mencapai 92,44 juta ton.***

**G**APKI mendorong peningkatan produksi CPO dan peningkatan produktivitas tanaman untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sebab, kebutuhan minyak sawit dua dekade ke depan hampir dua kali lipat dibandingkan saat ini. Hal ini disampaikan oleh Sekjen GAPKI M. Hadi Sugeng dalam seminar sawit series dengan tema *Menakar Keseimbangan Produksi CPO untuk Kebutuhan Domestik & Ekspor: Urgensi dan Tantangannya* yang diadakan oleh Warta Ekonomi Group dan Apkasindo di Jakarta pada 22 Juni 2024.

Minyak sawit merupakan komoditas minyak nabati Indonesia paling strategis dan memiliki pasar yang sangat luas. Potensi besar ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan mengawal komoditas ini dari aspek regulasi, keamanan, dan iklan investasi. Kontribusi sawit terhadap perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Yang dibutuhkan sekarang antara lain kecepatan dalam pengambilan keputusan tidak kepastian hukum serta tidak ada tumpang tindih peraturan.

Berdasarkan proyeksi Kemenko Perekonomian, produksi minyak sawit untuk menyongsong Indonesia



Emas 2045 mencapai 92,44 juta ton. Proyeksi ini nyaris dua kali lipat dari produksi terakhir yang mencapai 59,78 juta ton. Untuk merealisasikan produksi sebanyak ini tentu harus ada terobosan. Apalagi produksi sawit dalam beberapa tahun ini stagnan dan sejak 2010, *yield*-nya menurun akibat jumlah tanaman tua mencapai 40% atau 6,57 juta hektar.

Untuk memenuhi kebutuhan dua dekade mendatang, pemerintah menjalankan program PSR sejak dua tahun lalu. Namun, langkah ini harus didukung program lain lebih progresif. GAPKI telah menyusun beberapa scenario antara lain dilakukannya PSR untuk petani 150 ribu hektar ditambah perusahaan seluas 300 ribu hektar. Dengan langkah ini, produksi di

tahun 2045 menjadi 65 juta ton atau naik 10% dibandingkan sekarang.

Peningkatan produksi akan terjadi signifikan apabila peremajaan kebun sawit perusahaan mencapai 500 ribu hektar. Produksi diperkirakan naik menjadi 64,7 juta ton. Namun, masih jauh dari proyeksi 92,44 juta ton. Karena itu, dibutuhkan tambahan 4,5 juta hektar lahan terdegradasi untuk memecahkan masalah produksi ini. Peremajaan harus dilakukan mulai tahun 2025. Apabila tidak dilakukan akan terjadi penurunan produksi hingga 2045.

Langkah strategis dan taktis harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan sawit jika proyeksi 92,44 juta ton pada tahun 2045 ingin diwujudkan. ■



## MENDORONG DIALOG SOSIAL YANG KUAT DI SEKTOR SAWIT

*Program ini akan diujicobakan di sektor minyak sawit Indonesia dalam rangka menyempurnakan model.*

**H**ubungan industrial yang kuat menjadi salah satu faktor penting pengembangan industri kelapa sawit di masa depan. Apalagi kelapa sawit merupakan komoditas andalan ekspor bagi Indonesia dengan sumbangan devisa yang mencapai Rp 570 triliun per tahun. Untuk membangun hubungan industrial yang solid, dialog dan kepatuhan sosial memiliki peran penting dalam mencapai tujuan yang sama.

Perhatian pada topik ini mendorong ILO mengadakan lokakarya di Hotel Pullman Jakarta, 24-25 Juni 2024 yang dihadiri oleh Direktur ILO Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh, Specialist Rural Economist ILO Genewa Elvis Beytullayev dan perwakilan US Department of Labor, Carter K Quinley dan Jared Khalil. Dalam lokakarya ini, GAPKI diwakili oleh Kabid. Pengembangan SDM Sumarjono Saragih dan Komp. Hubungan Industrial Memed Kosasih.

Lokakarya ini bertujuan memvalidasi dan memberikan masukan tentang intervensi teknis, kerangka capaian yang diharapkan, dan target yang disasar yakni peningkatan kepatuhan sosial di sektor kelapa sawit.



Diskusi dua hari ini menghasilkan rumusan pengembangan perangkat berbasis bukti sebagai bahan untuk akses pekerja terhadap hak-hak mereka. Di sisi yang lain, dukungan pengembangan kapasitas juga akan dilakukan.

Sesuai dengan target yang diharapkan, program penguatan kepatuhan sosial sektor sawit akan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif untuk kepatuhan sosial melalui peran aktif pekerja melalui dialog sosial. Kepatuhan sosial yang efektif diproyeksikan akan mendorong citra dan persepsi positif sawit Indonesia di mata dunia. Apalagi pengembangan kepatuhan sosial ini menjadi program ILO yang didukung pemerintah Amerika Serikat.

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan Amerika Serikat

memberikan hibah dana kepada ILO untuk memperkuat sistem kepatuhan global dan melawan kerja paksa. Program ini akan diujicobakan di sektor sawit Indonesia dalam rangka menyempurnakan model untuk sistem kepatuhan sosial yang digerakkan oleh pekerja. Hasil ujicoba ini akan direplikasi ke negara lain dan sektor lain untuk mempromosikan suara pekerja dan kondisi kerja yang adil.

Program ILO ini sudah dikerjasamakan dengan GAPKI sejak 2017. Pada tahun ini dimulai kerjasama yang baru dengan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan Amerika Serikat. Sebelum program ini dijalankan, ILO mengajak pemangku kepentingan berembung dalam lokakarya yang diproyeksikan sebagai sarana konsultasi ILO kepada *stakeholders* sawit. ■

# TIGA KUNCI PERCEPATAN HILIRISASI INDUSTRI SAWIT

*Untuk memperbesar margin di hilir, maka intervensi pemerintah melalui regulasi khusus.*

**H**ilirisasi sawit sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah kelapa sawit dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi bangsa Indonesia. Untuk akselerasi hilirisasi sawit, GAPKI menekankan pada tiga faktor penting yakni intervensi pemerintah, penciptaan pasar di dalam negeri, dan penetapan segmentasi produk yang akan disasar.

Penekanan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI M. Fadhil Hasan dalam diskusi bertema *Strategi Lanjutan Akselerasi Hilirisasi CPO* di Kantor Kemenperin pada 20 Juni 2024. Diskusi ini dihadiri oleh Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, Managing Director Sinarmas Group, Saleh Husin, dan perwakilan asosiasi perusahaan yang terkait komoditas sawit.

Menurut M. Fadhil Hasan, apabila berkaca pada pohon industri



sawit, maka margin terbesar ada di hulu dengan hasil minyak sawit mentah. Jumlahnya mencapai 20% dari total nilai produk. Semakin ke hilir, *margin* semakin kecil. Untuk memperbesar *margin* di hilir, maka intervensi pemerintah melalui regulasi khusus harus dilakukan. Contohnya pemberlakuan pajak ekspor yang berlaku sejak 2011 dan dilanjutkan dengan pungutan ekspor.

Program hilirisasi yang sudah berjalan perlu terus dipercepat dan ditingkatkan karena nilai tambah yang dihasilkan semakin besar. Apalagi sawit menjadi tumpuan bagi sekitar 4,2 juta orang yang menghidupi 20,8 juta jiwa. Kontribusi berupa devisa negara mencapai Rp 450 triliun per tahun, khususnya dari ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi. Percepatan hilirisasi akan meningkatkan nilai ekonomi sawit hingga Rp 750 triliun per tahun.

Sementara itu, Ketua Bidang

Agro Industri Rapolo Hutabarat yang mewakili Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan pihaknya optimistis merealisasikan produksi 100 juta CPO per tahun pada 2045. Caranya adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan menyediakan bibit bersertifikat dengan harga terjangkau, kelancaran pupuk bersubsidi bagi petani sawit, dan menerapkan praktik pertanian yang baik.

Petani swadaya harus diberdayakan karena produktivitas mereka masih di bawah rata-rata nasional yakni 3-4 ton/hektar per tahun. Adapun produktivitas perusahaan sudah mencapai 6-7 ton/hektar per tahun dengan luas lahan yang ada sebanyak 16,38 juta hektar. Petani swadaya menjadi faktor penting karena porsi mereka mencapai 40% sehingga peningkatan produktivitas mereka akan berdampak besar terhadap produksi nasional. ■



# MENGENALKAN SAWIT DENGAN SENTUHAN KEARIFAN LOKAL PAPUA

***GAPKI selalu berpegang pada undang-undang, termasuk dalam menyikapi perbedaan pendapat tentang hak ulayat.***



**M**engenalkan komoditas kelapa sawit kepada masyarakat di setiap daerah harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Begitu juga ketika mengenalkan industri sawit kepada media di masing-masing daerah. Pendekatan berbasis kearifan lokal akan sangat membantu memberikan pemahaman yang utuh tentang komoditas andalan ekspor Indonesia ini. Dasar itulah yang melandasi GAPKI mengadakan diskusi dengan media di Papua.

Diskusi dan perkenalan antara GAPKI dan media di Papua yang diselenggarakan di Rumah Makan Bali Hai, Jayapura, 6 Juni 2024 ini diikuti oleh Kabid. Pengembangan SDM Sumarjono Saragih, Komp. Media Relations Fenny Sofyan, Ketua GAPKI Papua Tulus Sianipar bersama dua sekretaris GAPKI Papua Denny Sanjaya dan Syahril Mahmud. Media yang mengikuti diskusi berasal dari LKBN Antara, Tribun Jayapura, Cendrawasih Pos, dan Jubi Papua.

Dalam diskusi ini GAPKI menjelaskan seluk beluk kelapa sawit dari berbagai sudut pandang antara lain manfaat ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan sampai pengentasan kemiskinan. Dampak positif ini mulai

dirasakan oleh sebagian masyarakat yang beroperasi perkebunan sawit di daerahnya. Saat ini sudah ada 9 perusahaan sawit anggota GAPKI Papua. Sebanyak 4 perusahaan di Papua, 2 di Papua Selatan, 3 di Papua Barat Daya.

Kehadiran anggota GAPKI di Papua selalu diikuti dengan penyediaan fasilitas pendidikan, rumah ibadah, layanan kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya. Anggota GAPKI

bahkan mendatangkan tenaga pendidik dari luar kebun untuk meningkatkan kualitas Pendidikan bagi warga Papua di sekitar kebun. GAPKI selalu menekankan prinsip beroperasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan menjunjung tinggi tradisi lokal.

Potensi pengembangan sawit meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari luas tutupan kelapa sawit di Papua Barat sebesar 58.656 hektar dan Papua Barat sebesar 110.496 hektar. Artinya peluang pengembangan sawit masih sangat terbuka. Pengembangan sawit akan memberikan dampak ganda bagi perekonomian masyarakat.

Dalam menjalankan usahanya, GAPKI selalu berpegang pada undang-undang, termasuk dalam menyikapi perbedaan pendapat tentang hak ulayat. GAPKI berfokus pada perizinan dari pemerintah dan menjadikan izin sebagai pegangan. Sedangkan hak ulayat merupakan domain antara pemerintah sebagai regulator dan pemberi izin dengan masyarakat. Karena itu, GAPKI akan menjalankan usahanya selama regulator sudah menerbitkan izin. ■





## BORNEO FORUM KE-7 DORONG PENGUATAN KEPASTIAN HUKUM

*Tema Borneo Forum ke-7 adalah refleksi dari kondisi yang terjadi belakangan ini di sektor sawit.*

Kepastian hukum dan jaminan investasi yang aman menjadi topik utama dalam Borneo Forum ke-7 yang diselenggarakan di Swiss Bellhotel Danum, Palangka Raya, 28-29 Juni 2024. Tema ini dibahas Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, dan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono ketika berbicara di Borneo Forum ke-7 dengan tema Jaminan Investasi yang Aman untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Menurut Menteri AHY, ada empat hal yang harus diperhatikan dalam menangkap peluang investasi antara lain kepastian, keamanan, stabilitas, dan berkelanjutan. Pemerintah punya tanggung jawab menghadirkan kepastian hukum atas tanah. Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen menciptakan iklim kegiatan berusaha yang kondusif sambil tetap mengawal kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tema Borneo Forum ke-7 adalah refleksi dari kondisi yang terjadi belakangan ini di sektor sawit. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran memaparkan konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan sawit

sudah pasti merugikan kedua belah pihak. Karena itu, pihaknya mengajak perusahaan sawit bersama-sama mengentaskan kemiskinan, terutama masyarakat di sekitar kebun sawit. Salah satu caranya mendorong kebun plasma.

Menurutnya, kemiskinan di wilayahnya salah satunya karena masih terjadi konflik sosial dan agraria, Pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap Kementerian ATR membantu

merumuskan solusi atas konflik agraria yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini. Penyelesaian konflik agraria membuat investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya.

Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyampaikan GAPKI selalu berposisi sebagai partner pemerintah dan berharap koordinasi yang telah berjalan antara pemerintah dan pelaku usaha akan semakin baik. Hal ini diharapkan dapat membantu petani sawit dalam menghadapi masalah lahan yang diklaim masuk kawasan hutan.

Borneo Forum ke-7 kali ini menjadi platform bagi pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran, berbagi pengetahuan, dan memperkuat kolaborasi. Forum ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi regional serta kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit.

Selain diskusi membahas persoalan sawit, Borneo Forum ke-7 juga disemarakkan dengan berbagai kegiatan antara lain Pameran Inovasi Kelapa sawit, Pameran UMKM, Festival Kuliner, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Lomba Pidato Kampanye Sawit, Lomba Video Konten, Mewarnai Bersama anak PAUD sekota Palangkaraya, dan Fun Walk dan jalan sehat yang diikuti oleh 2.000 orang lebih. ■



## BERSAMA GAPKI, SATGAS SAWIT SOSIALISASIKAN HGU DAN FPKMS



**FPKMS bukan bagi-bagi kebun. Perusahaan hanya memfasilitasi pembangunan kebun, termasuk pembiayaannya.**

Untuk menyelaraskan regulasi HGU dan FPKMS, Satgas Sawit mengadakan sosialisasi HGU dan FPKM kepada seluruh dinas yang membindangi pertanahan dan perkebunan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalteng. Dalam sosialisasi di Hotel M Bahalap Palangarya, 26 Juni 2024 ini GAPKI diwakili oleh Wakil Ketua Umum II Susanto, Kabid Perkebunan R. Aziz Hidayat, Kabid Agraria & Tata Ruang Safwani, dan Kompartemen Percepatan PSR Muhammad Iqbal.

Kalimantan Tengah dipilih karena provinsi ini salah satu sentra penghasil komoditas sawit nasional dengan total luas mencapai 1,9 juta hektar. Sosialisasi HGU dan FPKMS diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah kabupaten/kota sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan. Bagi dunia usaha, referensi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan usaha yang mereka jalankan.

Dalam sosialisasi ini Satgas Sawit menegaskan pihaknya tidak membuat regulasi baru, tapi hanya menyelaraskan kebijakan strategis untuk percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri sawit. Karena itu, perusahaan yang



belum memiliki HGU wajib mengurus HGU paling lambat 31 Desember 2024 dengan memenuhi persyaratan. Untuk pengukuran HGU di atas 500 hektar dilakukan oleh pusat. Sampai saat ini, total lahan yang terdaftar di Kementerian ATR/BPN mencapai 120 juta bidang tanah.

Satgas Sawit mengajak GAPKI mendorong perusahaan proaktif mengajukan permohonan Hak Atas Tanah bagi yang belum memiliki HGU. Satgas Sawit membantu proses penerbitan HGU selama persyaratan sudah terpenuhi.

Data-data perusahaan di dalam SIPERIBUN akan dijadikan *baseline* atau landasan dalam pemenuhan kewajiban. Satgas Sawit meminta GAPKI Kalteng proaktif ke Badan Pertanahan Nasional setempat.

Terkait dengan regulasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) 20%, kebijakan FPKMS bukan bagi-bagi kebun. Perusahaan hanya memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, termasuk pembiayaannya. FPKM mengikat pada IUP sehingga hanya dilakukan

### Perusahaan di Kalteng Berdasarkan SIPERIBUN

- 212 Perusahaan Terdaftar
- 276 Perusahaan Izin Usaha Perkebunan Terdaftar
- 143 Perusahaan Sudah Lapor HGU
- 118 Perusahaan Sudah Lapor FPKM

sekali saja sesuai dengan terbitnya IUP. Satgas Sawit menegaskan FPKM 20% merujuk pada undang-undang perkebunan.

Selain itu, implementasi FPKMS bergantung pada waktu penerbitan IUP yang terdiri dari fase yakni (1) perusahaan yang sudah memiliki izin usaha sebelum 28 Februari 2007, (2) perusahaan yang memiliki izin usaha setelah 28 Februari 2007 sampai 2 November 2020, dan (3) perusahaan yang memiliki izin usaha setelah 2 November 2020. ■

# GAPKI SUMBAR BANTU KORBAN BANJIR LAHAR DINGIN MARAPI

**Apresiasi diberikan karena GAPKI merespon cepat situasi masa tanggap darurat bencana.**

**B**encana banjir lahan dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat sejak 11 Mei 2024 telah menyebabkan puluhan korban jiwa dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Beberapa daerah terisolasi akibat bencana yang disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi. Tanggap darurat diberlakukan oleh pemerintah hingga dua pekan untuk evakuasi dan keselamatan masyarakat terdampak bencana.

Kondisi darurat ini mendorong GAPKI Cabang Sumatera Barat menyalurkan bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Bantuan berupa bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, beras, sarung, selimut, air mineral, susu bubuk, sarden kaleng, popok bayi, dan pembalut wanita didistribusikan kepada korban



bencana pada 18 Mei 2024. Pengurus GAPKI Sumbar menangani langsung pengiriman bantuan.

Ketua GAPKI Cabang Sumbar Bambang Wiguritno mengatakan pihaknya turut prihatin atas penderitaan masyarakat terdampak bencana. Sebagai bagian dari masyarakat, pengusaha kelapa sawit anggota GAPKI berupaya membantu meringankan beban mereka. Bantuan ini juga bentuk kepedulian GAPKI kepada masyarakat terdampak bencana. Jenis bantuan yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan di masa tanggap darurat.

Bambang Wiguritno menegaskan lokasi banjir lahan dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar sebenarnya jauh dari wilayah operasional perusahaan kelapa sawit anggota GAPKI. Namun, hal ini bukan halangan bagi GAPKI untuk membantu masyarakat yang sedang terkena musibah bencana. GAPKI Cabang

Sumbar berharap bantuan sembako dapat meringankan beban mereka dan bencana dapat diatasi segera.

Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Edi Busti dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana menyampaikan terima kasih atas bantuan korban bencana banjir lahar dingin yang disalurkan oleh GAPKI Cabang Sumbar. Apresiasi diberikan karena GAPKI merespon cepat situasi masyarakat selama masa tanggap darurat bencana.

Saat ini, luas kebun sawit di Sumatera Barat sekitar 500.000 hektar dengan produktivitas rata-rata 4 ton CPO per hektar/tahun. Sebanyak 112.000 hektar lahan dikelola oleh 19 anggota GAPKI. Sedangkan 160.000 hektar milik perusahaan sawit di luar GAPKI dan sisanya kebun plasma dan petani swadaya. Industri sawit di daerah ini diuntungkan dengan adanya Pelabuhan Teluk Bayur sehingga ekspor CPO lebih mudah. ■



# GAPKI BAHAS BERAGAM TOPIK TENTANG SAWIT DI AL JAZZERA

*Ketua Umum GAPKI Eddy Martono juga merespon beberapa topik hangat tentang sawit yang menjadi diskusi publik.*

Tantangan yang dihadapi oleh industri sawit di Indonesia tidak pernah berhenti dan selalu datang silih berganti. Ada kalanya tantangan datang dari luar negeri, namun tak jarang juga yang berasal dari dalam negeri. Dua-duanya harus dihadapi secara bijak dan proporsional sesuai dengan kapasitas masing-masing. Berangkat dari munculnya tantangan setiap waktu, GAPKI secara konsisten mengkomunikasikan industri ini kepada publik.

Kegiatan komunikasi salah satunya dilakukan melalui wawancara dengan Al Jazeera, salah satu jaringan televisi global yang cukup berpengaruh. Kantor berita milik Al Jazeera Media Network yang berbasis di Doha, Qatar ini menggelar wawancara eksklusif dengan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono di kantor GAPKI di Jakarta, 20 Juni 2024. Berbagai pertanyaan tentang industri sawit dan isu-isu terkini tidak lepas dari materi wawancara.

Wawancara dengan Al Jazeera adalah kesempatan bagi GAPKI

menjelaskan industri sawit di Indonesia, kontribusinya pada ekonomian negara, perannya dalam pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja, tanggung jawab sosial yang menjadi bagian tak terpisahkan dari industri sawit nasional. Dengan jangkauan Al Jazeera yang sangat luas, wawancara ini diharapkan membuka pandangan publik yang lebih adil terhadap komoditas sawit.

Dalam wawancara ini, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono juga merespon beberapa topik hangat tentang sawit yang menjadi diskusi publik. Salah satunya isu dan kampanye negatif komoditas sawit di Papua yang harus dipandang secara utuh. GAPKI berharap masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat keberadaan sawit bagi kehidupan mereka. Harapan itu juga untuk masyarakat Papua.

GAPKI menegaskan bahwa usaha

yang dijalankan oleh perkebunan kelapa sawit di Indonesia selalu mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah sebagai regulator adalah pihak yang berhak menentukan suatu kawasan bisa dimanfaatkan untuk perkebunan sawit atau tidak. Pengusaha menjalankan bisnisnya sesuai dengan perizinan yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Diskusi GAPKI dan Al Jazeera diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi industri sawit nasional di tengah upaya para *stakeholders* sawit membangun citra positif dan mengadakan kampanye positif sawit di berbagai negara. Selain itu, pemberitaan di Al Jazeera diharapkan menjadi konten positif bagi perkembangan komoditas sawit di Indonesia.



# WIWIN KURNIAWAN TERPILIH SEBAGAI KETUA GAPKI CABANG BENGKULU



**Harapannya koordinasi tentang sawit di Bengkulu bisa melalui satu pintu yakni GAPKI Bengkulu.**

**R**egenerasi dan kaderisasi merupakan keniscayaan bagi organisasi yang ingin bertumbuh dan berkembang dengan baik. Pergantian nakhoda organisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga harus dilakukan dalam waktu tertentu. Proses ini terjadi di GAPKI Bengkulu melalui Musyawarah Cabang GAPKI Bengkulu ke-3 di Hotel Santika Bengkulu, 3 Juli 2024. Dalam Muscab yang dihadiri 13 anggota ini, Wiwin Kurniawan terpilih sebagai Ketua GAPKI Cabang Bengkulu

2024-2029.

Pelantikan Wiwin Kurniawan dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono di hari dan tempat yang sama. Pelantikan ini dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Ketua GAPKI Sumut, Kaltim, Kalbar, perwakilan GAPKI cabang lainnya serta pengurus GAPKI. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengucapkan selamat kepada pengurus GAPKI Bengkulu 2024-2029 dan meminta program kerja yang ditetapkan dalam MUScab sebagai pedoman.

Ketua Umum GAPKI berpesan agar GAPKI Bengkulu menyelaraskan program kerja dengan prioritas utama GAPKI saat ini yakni percepatan PSR Jalur Kemitraan, kebijakan FPKMS 20%, dan advokasi penyelesaian kebun sawit di kawasan hutan. Program kerja ini juga menjadi program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas.

Sinergi dengan pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar keberadaan GAPKI semakin dirasakan oleh anggota dan masyarakat.

Sebagai Ketua GAPKI Bengkulu, Wiwin Kurniawan menyatakan

siap menjalankan prioritas program kerja sesuai arahan Ketua Umum GAPKI serta mengkombinasikan dengan target-target GAPKI Bengkulu. Apalagi program kerja yang sudah disepakati dalam Musyawarah Cabang ke-3 ini merupakan amanat yang harus dijalankan untuk lima tahun mendatang. Karena itu, Wiwin Kurniawan akan meningkatkan konsolidasi organisasi dan meningkatkan kebersamaan dengan sesama anggota GAPKI.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam sambutan pelantikan mengatakan perusahaan sawit yang beroperasi di wilayahnya mencapai 50 perusahaan. Namun, baru 13 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI. Pihaknya akan mendorong perusahaan lain bergabung dengan GAPKI untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi tentang program daerah. Harapannya koordinasi tentang sawit di Bengkulu bisa melalui satu pintu yakni GAPKI Bengkulu.

Gubernur Rohidin Mersyah mengatakan Bengkulu memang bukan penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia seperti Riau, Kalimantan Barat atau Sumatera Utara. Namun, peran sawit sangat signifikan bagi masyarakat karena menjadi komoditas utama. Karena itu, kebijakan terkait sawit berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan warga Bengkulu. ■





# *Kompak, Ceria, dan Bersama*

Ini bukan sekadar permainan. Tapi, proses membangun kekompakan dalam suasana ceria untuk membangun kebersamaan sesama pengurus GAPKI di seluruh Indonesia. Keriangan yang terbangun dalam suasana Rapat Kerja Nasional 2024 GAPKI di Grand Mercure Hotel Bandung pada 21 Mei 2024.

